

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 5 No. 1, April 2012

MENGUJI TAFSIR KEADILAN



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial	Vol 5	No.1	Hal. 1-116	Jakarta April 2012	ISSN 1978-6506
--------------------	-------	------	---------------	-----------------------	-------------------

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3
Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215
Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Edisi April 2012. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Filsafat dan Pidana)
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum
4. Prof. Dr. Meila Rahayu, S.H., M.H. (Pakar Hukum
5. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. (Pakar Hukum
6. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Pakar Hukum
7. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (Pakar Hukum
8. Laode M. Syarif, S.H., LL. M., Ph.D (Pakar Hukum
9. Rm. Dr. Alexius Andang Listya Binawan. (Pakar Hukum

Penanggung Jawab	: Muzayyin Mahbub.
Pemimpin Redaksi	: Patmoko
Penyunting/Editor	: 1. Hermansyah 2. Onni Roeslani 3. Heru Purnomo 4. Imron 5. Asep Rahmad Fajar 6. Suwanto
Redaktur Pelaksana	: Dinal Fedrian Arnis Duwita Purnama
Sekretariat	: 1. Sri Djuwati 2. Yuni Yulianita 3. Romlah Pelupessy. 4. Ahmad Baihaki 5. Arif Budiman. 6. Adi Sukandar 7. Aran Panji Jaya 8. Nur Agus Susanto
Desain Grafis & Fotografer	: Widya Eka Putra

MENGUJI TAFSIR KEADILAN

Adakah keadilan di muka bumi ini? Kepada siapa keadilan diperoleh? Jawaban dua pertanyaan tersebut tidaklah mudah khususnya bagi ahli hukum lantaran membutuhkan proses perdebatan mendalam berdasarkan beragam teori hukum.

Secara sederhana, keadilan terbagi dalam tiga kelompok besar. Yaitu, keadilan berdasarkan hukum, keadilan berdasarkan suara mayoritas, dan keadilan berdasarkan ketuhanan. Kelompok di atas masing-masing memiliki alasan yang berbeda satu dengan lainnya. Bagi kelompok pertama, keadilan akan diperoleh berdasarkan hukum yang berlaku sehingga dikenal sebagai kelompok aliran positifisme. Bagi kelompok ini keadilan melalui proses peradilan yang diputuskan oleh hakim. Sementara kelompok kedua memandang keadilan diperoleh melalui suara mayoritas yang mendengungkan semboyan “*vox populi vox de*” atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Adapun bagi kelompok terakhir, keadilan baru bisa diperoleh apabila bersumber pada kitab suci dan keyakinan terhadap Tuhan.

Negara hukum seperti Indonesia lebih cenderung menganut kelompok pertama. Alhasil, keadilan diperoleh mayoritas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan, sebagai representasi pemberi keadilan adalah hakim yang berada dalam lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman). Di Indonesia, kekuasaan kehakiman bertumpu pada Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya memiliki wewenang berbeda guna memberikan keadilan.

Berbeda dengan hakim di MA yang memiliki Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim dan pengawasan internal melalui jejang pengadilan yang lebih tinggi/atau kasasi, MK tidak memiliki pengawas eksternal dan jejang putusan yang lebih tinggi karena putusannya terakhir dan mengikat, *final and binding*. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK telah mentasbihkan hal itu.

Dalam negara hukum yang mengedepankan *check and balances* maka tidak ada satu pun kekuasaan yang tidak dapat diawasi, termasuk kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu *check and balances* kekuasaan kehakiman agar mampu mewujudkan keadilan. Kalimat sederhana yang melukiskan hal itu ialah hakim sama seperti manusia lainnya yang dapat salah atau tergoda dengan kehidupan duniawi. Bila terjadi, maka hakim akan melahirkan putusan yang jauh dari nilai keadilan. Berdasarkan pemikiran di atas “Menguji Tafsir Keadilan” menjadi tema besar dalam jurnal edisi ini.

Sebagai akhir kata, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain yang membantu kehadiran jurnal kali ini. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 5 No. 1, April 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

UDC: 342.5

Chandranegara IS (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta)

Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara

Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009

Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, hal 1-16

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu adalah kewenangan yang tidak didapatkan melalui Undang-Undang Dasar namun melalui praktik peradilan. Kewenangan untuk menguji Perppu sepatutnya tidak diperoleh oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya potensi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yakni dengan DPR selaku pemegang kewenangan konstitusional untuk menguji Perppu dan Presiden selaku pemegang kekuasaan mutlak legislasi dalam ihkwal kepentingan memaksa. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat atau tidak dapatnya menguji Perppu perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

(Chandranegara IS)

Kata kunci: pengujian konstitusional, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Perppu, supremasi konstitusi.

UDC: 658.114.6

Rajagukguk E (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

Perluasan Tafsir Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Kajian Putusan Nomor 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST

Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, hal 51-63

Karangan ini membahas komentar atas putusan hakim dalam perkara “P” dkk v. KPPU No. 34/Pdt.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST. Perkara ini bermula dari Putusan KPPU terhadap PT “P” (Persero) dan tiga perusahaan lainnya yang mempersalahkan mereka melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memutuskan bahwa keempat perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan dan diskriminasi dalam pemilihan partner strategis. KPPU berpendapat, bahwa pemilihan partner itu yang dilakukan melalui “beauty contest” sama dengan pengadaan barang dan jasa. KPPU menghukum PT “P” dan tiga perusahaan lainnya membayar denda. Namun proyek tersebut tetap dapat diteruskan. Kesemua terhukum tidak setuju dengan Putusan KPPU tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diperkenankan oleh Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Pada tingkat banding, PN Jakarta Pusat memperkuat putusan KPPU. Karangan ini membahas putusan PN Jakarta Pusat dimana penulisnya tidak sependapat

UDC: 349 Rahayu MIF (Fakultas Hukum, Universitas Islam, Bandung) Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah Kajian Putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Bdg Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, hal 17-35 Dalam perkara gugatan <i>class action</i> tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah, majelis hakim memutuskan berlandaskan pada akta perjanjian yang dibuat oleh para penggugat dan tergugat. Berdasarkan aspek sosial, putusan tersebut dirasakan adil karena memenuhi tuntutan ganti kerugian yang dituntutkan oleh para penggugat. Namun dari sisi ekologi kasus longsor TPA ini menyisakan persoalan tersendiri karena terjadi ketidakadilan ekologis. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan nilai ekologis yang dimiliki oleh alam dan lingkungan sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini dan tidak memerintahkan para tergugat untuk menangani TPA tersebut sesuai dengan nilai-nilai ekologis. Pada hakekatnya, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta memiliki nilai sehingga harus diperlakukan sama walaupun dengan pembobotan perlakuan yang berbeda-beda. Alam semesta dan kehidupannya masuk dalam pertimbangan dan kepedulian moral manusia sehingga keberadaannya tidak selalu dikorbankan hanya untuk kepentingan manusia saja. Untuk itu perlu adanya kepedulian, tanggung jawab dan kewajiban moral dari manusia sebagai pelaku moral.	dengan putusan KPPU dan PN Jakarta Pusat. (Erman Rajagukguk) Kata kunci: pengadaan barang dan jasa, pemilihan mitra strategis, persekongkolan dan diskriminasi, bukti tidak langsung. UDC: 608.3 Purwaningsih E (Fakultas Hukum, Universitas Yarsi, Jakarta) Penerapan <i>World Wide Novelty</i> dan <i>Function-Way-Result Test</i> Pada Paten Kajian Putusan Nomor 075 PK/Pdt. Sus/2009 Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, hal 84-98 Paten sebagai konstruksi hukum memberikan perlindungan hukum bagi penemuan yang memenuhi persyaratan paten, yaitu: unsur kebaruan dari penemuan; langkah inventif yang terkandung dalam penemuan; serta dapat atau tidaknya penemuan diterapkan dalam industri. Untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus memperhatikan spesifikasi paten (dalam klaim) dan kebaruan penemuan tersebut di seluruh dunia, juga <i>function-way-result test</i>, terutama dalam kasus ini. Dalam pengajuan paten diwajibkan untuk mengungkapkan secara tepat unsur-unsur dari penemuan yang dimintakan perlindungan. Dengan demikian, dalam aplikasi hendaklah tertulis deskripsi tentang esensi dari penemuan. Ruang lingkup atau luasnya perlindungan paten tergantung pada klaim, klaim menunjukkan inti dari penemuan, sehingga untuk menilai pelanggaran paten
--	---

(Rahayu MIF) Kata kunci: <i>class action</i>, keadilan ekologis	tergantungan pada interpretasi klaim, <i>fling date</i>, <i>state of the art</i> dan cakupan klaim paten terdahulu (<i>prior art</i>). (Endang Purwaningsih) Kata kunci: paten, <i>worldwide novelty</i>, <i>function-way-result test</i>.
UDC: 347.956.6 Syamsudin M (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, hal 36-50 Tujuan dari kajian putusan ini adalah untuk menguji apakah putusan majelis hakim di pengadilan tingkat banding sudah mencerminkan putusan yang adil baik secara prosedural maupun substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan hakim sudah mengikuti prosedur hukum acara secara memadai, bahkan majelis hakim terkesan sangat ketat dalam menerapkan prosedur hukum acara berdasarkan HIR dan Rv. Namun demikian putusan majelis hakim ini belum sampai pada memeriksa pokok sengketa yang didasarkan pada hukum materiil. Putusan ini belum menyentuh substansi atau pokok perkara yang disengketakan, sehingga belum mencerminkan keadilan substantif. Putusan hakim ini terasa kering dan belum menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum dielaborasikannya faktor-faktor non-yuridis dalam pertimbangan hakim, akibatnya kepentingan Para Terbanding belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai danimbang secara substansial. Padahal keadilan substantif itulah yang harus diwujudkan hakim pada akhir putusannya.	UDC: 608.3 Purwaningsih E (Fakultas Hukum, Universitas Yarsi, Jakarta) Penerapan <i>World Wide Novelty</i> dan <i>Function-Way-Result Test</i> Pada Paten Kajian Putusan Nomor 075 PK/Pdt.Sus/2009 Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, hal 84-98 Paten sebagai konstruksi hukum memberikan perlindungan hukum bagi penemuan yang memenuhi persyaratan paten, yaitu: unsur kebaruan dari penemuan; langkah inventif yang terkandung dalam penemuan; serta dapat atau tidaknya penemuan diterapkan dalam industri. Untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus memperhatikan spesifikasi paten (dalam klaim) dan kebaruan penemuan tersebut di seluruh dunia, juga <i>function-way-result test</i>, terutama dalam kasus ini. Dalam pengajuan paten diwajibkan untuk mengungkapkan secara tepat unsur-unsur dari penemuan yang dimintakan perlindungan. Dengan demikian, dalam aplikasi hendaklah tertulis deskripsi tentang esensi dari penemuan. Ruang lingkup atau luasnya perlindungan paten tergantung pada klaim, klaim menunjukkan inti dari penemuan, sehingga untuk menilai pelanggaran paten tergantung pada interpretasi klaim, <i>fling</i>

(Syamsudin M) Kata kunci: keadilan substantif, putusan banding, sengketa sita jaminan.	<i>date, state of the art</i> dan cakupan klaim paten terdahulu (<i>prior art</i>). (Endang Purwaningsih)
UDC: 343 Dwiatmodjo H (Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto) Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, hal 99-116 Penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus pencurian kakao sudah sesuai dengan pemikiran dasar pemberian pidana bersyarat. Pemikiran dasar pemberian pidana bersyarat tersebut pada intinya terdiri dari empat aspek: Pertama, pidana bersyarat dijatuhkan untuk menolong terpidana agar belajar hidup produktif. Kedua, pidana bersyarat menjadi lembaga hukum yang lebih baik dari sekedar kelapangan hati hakim maupun masyarakat. Ketiga, pidana bersyarat menjadi sarana koreksi yang bermanfaat bagi terpidana dan masyarakat. Keempat, pidana bersyarat berorientasi pada perbuatan dan juga pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana bersyarat ini telah sesuai dengan prinsip hukum pidana yang mengutamakan pencegahan. (Haryanto Dwiatmodjo) Kata kunci: pidana bersyarat, pencurian, keadilan.	Kata kunci: paten, <i>worldwide novelty, function-way-result test</i>.

JOURNAL OF YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 5 No. 1, April 2012

The descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC: 342.5

Chandranegara IS (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta)

The Review of Government Regulation in Lieu of Law Regarding Constitutional Authority Dispute Among The State Institutions

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009

Journal Of Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, page 1-16

The authority of the Constitutional Court to review the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) is not obtained through the judicial practice, instead of the constitution. In theory such an authority should not given to the constitutional court since the existance of potential disputes between the court and other high ranked state entity like punishment and/or house of representatives. In term of the state circumstances of the state of emergency, the President has the exclusive power to produce th Perppu. Thus, it is of great importance that the constitutional court showed have this authority strictly regulated in the coming amamded constitution.

(Chandranegara IS)

Keywords: constitutionalreview, constitutional authority dispute, the government regulation in lieu of law (Perppu), rule of law.

UDC: 658.114.6

Rajagukguk E (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

An Extensive Interpretation On Article 22 Of The Law Number 5 Year 1999

An Analysis of Decision Number 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST

Journal Of Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, page 51-63

This article is aimed to share some comments on a court decision over the case of PT “P” c.s. v. KPPU. The KPPU has delivered a decision against PT “P” and three other companies blaming them to commit an unlawful practice as stated in Article 22 of Law No. 5 Year 1999. KPPU decides that the four companies have performed conspiracy and discrimination in selecting strategic partner. KPPU is of the opinion that the way of partner selection being conducted through “beauty contest” is the same way with that of procurement of goods and services. KPPU ordered the four companies to pay a fine and the decision was supported later on by the Jakarta Central Distric Court. The author of this article has different opinions with the decisions.

(Erman Rajagukguk)

Keywords: procurement, selection of strategic partners, conspiracy and discrimination, indirect evidence.

UDC: 349

Rahayu MIF (Fakultas Hukum, Universitas Islam, Bandung)

The Ecological Justice in Class Action Lawsuit of Leuwigajah Final Disposal Landfill

An Analysis of Decision Number 145/PDT.G/2005.PN.BDG

Journal Of Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, page 17-35

In a class action lawsuit on the case of Leuwigajah Final Disposal Landfill, the panel of judges has passed a decision in favor of the residents based on a deed of agreement made by the plaintiffs and defendants. According to the contract, the plaintiffs as the class members are entitled to get compensation. In the social point of view, the court ruling is considered fair enough. But in term of ecology, the decision leaves its own problems, i.e. the ecological injustice, since the judges never weighed up the ecological values of nature and environment as their main concerns. In the perspective of ecology, every single creature in the universe has the right to exist. In many cases like the Leuwigajah incident, both human beings and their environmental should be correspondingly taken into account. The decision is supposed to emphasize the involvement, responsibility, and obligation of human beings as the moral actors in such cases.

(Rahayu MIF)

Keywords: class action lawsuit, ecological justice.

UDC: 347.918

Hikmah M (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

The Refusal Of International Arbitration Decision In The Case Of Astro All Asia Network PLC (ASTRO)

An Analysis of Decision Number 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP

Journal Of Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, 64-83

Even though Indonesia has already had the Arbitration Law, refusals of the international arbitration decisions still happen. One of which is the object of analysis in this article, that is the case of AstroAllAsiaNetworkPlc. The application of the international arbitration decision from Singapore was refused by the Central Jakarta District Court. This refusal is confirmed by the Supreme Court. This article discuss any court's considerations for the refusal. It seems that some reasoning are not in accordance with the Arbitration Law, that come from both at the district court level and the Supreme Court. That such refusal, in consequence, could cause bad impact to the international bussiness climate. The Government was supposed to admit and implement the international arbitration decisions as a consequence of Indonesia's membership of the 1958 New York Convention.

(Mutiara Hikmah)

Keywords: Arbitration Law, international arbitration decision.

UDC: 347.956.6

Syamsudin M (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

The Overlooked Substantive Justice In A Case Of Sequestration Dispute

An Analysis of Decision Number 42/PDT/2011/PT.Y

Journal Of Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, page 36-50

The purpose of this study is to examine whether a decision of the Yogyakarta Court of Appeal has been procedurally and substantively just. The author of this article discloses that the panel of judges who handled the case has strictly applied the procedural law as stated in the HIR and Rv so that the decision can be regarded as the procedural justice contained. However, the judges' decision in this case does not reflect the substantive justice, since it has not reached the level of verifying the subject of disputes based on substantive law. The judges' decision is too formalistic in checking and resolving the matter, so it only emphasizes the procedural fairness values instead of substantive justice values. In fact, substantive justice is of significance that must be upheld by judges at any kind of decision

(Syamsudin M)

Keywords: substantive justice, court of appeal decision, warranty-confiscation dispute.

UDC: 608.3

Purwaningsih E (Fakultas Hukum, Universitas Yarsi, Jakarta)

The Application Of Worldwide Novelty And Function-Way Result-Test On Patent

An Analysis of Decision Number 075 PK/Pdt. Sus/2009

Journal Of Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012, page 84-98

Patent as legal construction gives legal protection for the invention which fulfills requirements for a patentable invention, such as: novelty, non-obviousness/inventive steps and industrial applicability. In order to create legal certainty and justice, the judge should pay attention to the specification of patent (in the claim) and the application of worldwide novelty, also function way result test, especially in this case. In the claim, it is required to state and clarify precisely the elements of invention for which protection is sought. Thus, the claim should be composed of a description or explanation of the essence of the invention. The scope or the extent of patent protection is based on the claim. The essence of protection also depends on the claim; therefore the infringement depends on the interpretation of the claim, filing date, state of the art and prior art scope of the claim.

(Endang Purwaningsih)

Keywords: patent, worldwide novelty, function-way-result test.

UDC: 343

*Dwiatmodjo H (Fakultas Hukum, Universitas
Jenderal Soedirman, Purwokerto)*

*A Conditional Sentence Imposed Upon The
Conviction Of Theft Of Cocoa*

*An Analysis of Decision Number 247/
Pid.B/2009/PN. Pwt*

*Journal Of Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012,
page 99-116*

The imposition of conditional penalties over criminal acts in case of theft of cocoa is in conformity with the main purpose of conditional penalties. The main purpose of conditional penalties essentially consists of four aspects. First, it is imposed to help the inmates learning to live productively. Second, it works as an implied law institution for the inmates better than the broad-mindedness of the judge or the public. Third, it becomes a medium for correction for the inmates and the society. Fourth, it is oriented to the action and also the criminals. Therefore, the imposition of conditional penalties over criminal acts has been in accordance with the principles of criminal law that prioritizes prevention.

(Haryanto Dwiatmodjo)

*Keywords: conditional penalties, theft,
justice.*

PENGUJIAN PERPPU TERKAIT SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL ANTAR-LEMBAGA NEGARA	1
Kajian Atas Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009	
Ibnu Sina Chandranegara	
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta	
KEADILAN EKOLOGIS DALAM GUGATAN CLASS ACTION TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR LEUWIGAJAH	17
Kajian Putusan Nomor 145/PDT.G/2005/PN.BDG	
Mella Ismelina Farma Rahayu	
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung	
KEADILAN SUBTANTIF YANG TERABAIKAN DALAM SENGKETA SITA JAMINAN	36
Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y	
M. Syamsudin	
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
PERLUASAN TAFSIR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999	51
Kajian Putusan Nomor 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST	
Erman Rajagukguk	
Fakultas Hukum Universitas Indonesia	
PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM KASUS ASTRO ALL ASIA NETWORK PLC (ASTRO)	64
Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP	
Mutiarah Hikmah	
Fakultas Hukum Universitas Indonesia	
PENERAPAN WORLD WIDE NOVELTY DAN FUNCTION-WAY-RESULT TEST PADA PATEN	84
Kajian Putusan Nomor 075 PK/PDT.SUS/2009	
Endang Purwaningsih	
Fakultas Hukum Universitas YARSI	
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS PENCURIAN KAKAO	99
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT	
Haryanto Dwiatmodjo	
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	